

Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Ambon

Rasni Hanipa Usemahu¹, Sherlie Evabioni Latuamury²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

¹ anamaulana549@gmail.com

Abstract

This research adopts a descriptive quantitative method. The data sources used include primary data obtained from the Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Ambon City, such as the Realization Report on Regional Budget and Expenditures for the 2019-2023 period. The indicators used in this study include the following ratios: Fiscal Dependency Ratio, Budget Effectiveness Ratio, Efficient Budget Usage Ratio, and Fiscal Authority Distribution Ratio.

The research findings indicate that the financial performance of the BPKAD of Ambon City, based on (1) Fiscal Independence Ratio, with an average ratio of 18.95% during the 2019-2023 period, is still considered low. Therefore, it is important for the Ambon City Government to continuously explore PAD (Local Revenue) potential so that dependence on transfer funds can decrease, improving the region's fiscal independence. (2) The Effectiveness Ratio indicates that Ambon City is ineffective, with a ratio value of 74.19%, below 100%. (3) The Efficiency Ratio of Ambon City is considered inefficient, with an average ratio ranging from 90% to 100%, specifically 95.43%. (4) The Fiscal Decentralization Degree Ratio of Ambon City is still considered insufficient, with a ratio value of 15.49%.

Key words : Financial Performance of the Region, Financial Ratios.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Ambon berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah yang dikelola oleh BPKAD Kota Ambon dengan menggunakan berbagai rasio keuangan.

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, antara lain Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah untuk periode 2019-2023. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rasio-rasio berikut: Rasio Ketergantungan Fiskal, Rasio Keefektifan Anggaran, Rasio Penggunaan Anggaran yang Efisien, Rasio Pembagian Kewenangan Fiskal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kota Ambon dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Dengan rata-rata rasio sebesar 18,95% selama periode 2019-2023, masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah daerah Kota Ambon untuk terus menggali potensi PAD agar ketergantungan pada dana transfer bisa semakin berkurang, sehingga kemandirian fiskal daerah dapat meningkat. (2) Rasio Efektivitas Kota Ambon dikatakan tidak efektif karena nilai rasionya masih dibawah 100% yaitu 74,19%. (3) Rasio Efisiensi Kota Ambon dikatakan kurang efisien karena rata-rata rasionya berada diantara 90%-100% yaitu 95,43%. (5) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Ambon setelah dianalisis masih dikatakan kurang karena nilai rasionya sebesar 15,49%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan.

Diterima Redaksi : xx-xx-20xx | Selesai Revisi : xx-xx-20xx | Diterbitkan Online : xx-xx-20xx

1. Pendahuluan

Autonomi berarti 'memerintah sendiri' dan merujuk pada pemerintahan lokal dalam administrasi publik konsep dasar wewenang yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Hal ini mencakup inisiatif, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta kemajuan daerah masing-masing." Tujuan utama otonomi adalah mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien." "Pengelola keuangan daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah." Potensi daerah tercermin dari kinerja keuangan yang baik, yang memerlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas. Pengelolaan yang efektif memerlukan

dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu mengevaluasi dan mengukur kinerja daerah dengan tepat. Sumber daya manusia yang terampil dan kompeten sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah.

Analisis anggaran daerah membantu menilai kinerja dengan membandingkan komponen-komponen anggaran. Sesuai aturan yang berlaku, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat secara mandiri. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengoptimalkan pendapatan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah."

Evaluasi terhadap kinerja anggaran daerah dapat dilakukan melalui analisis anggaran, yang mencakup perbandingan antar komponen anggaran. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara independen. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola pendapatan guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah."

Performa keuangan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran secara lebih fleksibel demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, sepanjang tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan, khususnya anggaran daerah, untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal dalam mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan anggaran ke depan. Temuan dari analisis rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan, serta sebagai indikator untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang

Evaluasi laporan keuangan pada Laporan APBD daerah Kota Ambon sangat penting, karena dilakukan dengan membandingkan hasil satu periode dengan periode sebelumnya. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi pola yang muncul dalam rasio kinerja keuangan daerah, yang dapat memberikan panduan bagi pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi kondisi keuangan daerah tersebut

Laporan realisasi anggaran adalah sarana utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Laporan ini menyajikan berbagai data penting terkait pendapatan, transfer, defisit, surplus, dan sumber pembiayaan daerah Untuk mendukung potensi yang dimiliki daerah,

dibutuhkan sumber daya yang kuat. Se jauh mana daerah mematuhi aturan dalam penggunaan keuangan yang baik akan tercermin dari potensi daerah yang ada. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik, pemberdayaan potensi pemerintah yang baik sangat penting. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban dalam mencapai kinerja keuangan yang baik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Data yang digunakan yaitu laporan realisasi anggran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2019 – 2023. Salah satu laporan yang dipresentasikan adalah Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang menggambarkan total anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam menjalankan berbagai kegiatan di wilayah tersebut. Berikut ini disajikan data Pendapatan Daerah untuk tahun 2019-2023 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 1.1
Laporan Pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Daerah, BPKAD Kota Ambon 2019-
2023

| | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Tranfer | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Total pendapatan Asli Daerah |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2019 | 162.761.891.568,30 | 985.087.890.725,00 | 51.971.549.595,00 | 1.199.821.331.888,30 |
| 2020 | 131.753.250.767,07 | 973.189.179.158,00 | 41.524.852.663,00 | 1.146.467.282.588,07 |
| 2021 | 153.520.817.934,78 | 940.614.682.967,00 | 48.860.520.737,00 | 1.142.996.021.638,70 |
| 2022 | 117.889.732.162,73 | 917.963.704.149,00 | 18.592.908.733,00 | 1.114.446.345.004,73 |
| 2023 | 274.081.392.232,88 | 930.454.712.510,00 | 0,00 | 1.204.536.104.742,88 |
| Rata-rata | 168.001.416.933,15 | 781.980.185.649,8 | 32.189.966.345,6 | 1.161.653.417.172.536 |

Tabel yang ditampilkan menggambarkan perkembangan Pendapatan pemerintah Daerah Kota Ambon selama lima tahun berturut-turut, yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi ini terjadi pada Unsur Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Sumber Pendapatan Sah lainnya Nilai rata-rata untuk tahun 2019-2023 menggambarkan bahwa Pendapatan Kota Ambon menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sebagaimana terlihat dari dominasi pendapatan transfer dalam struktur pendapatan daerah.

Di sisi lain, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil, mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal. Ketergantungan ini menandakan bahwa Kota Ambon belum sepenuhnya mampu menggali dan mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal. Selain itu, PAD yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan penurunan signifikan pada tahun 2022, menunjukkan adanya tantangan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kondisi ini

menyoroti perlunya strategi inovatif untuk memperkuat sektor lokal dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat.

Kondisi ketergantungan tinggi Kota Ambon terhadap dana transfer pusat dan fluktuasi PAD memiliki keterkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. bahwa pendapatan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya. Undang-undang ini mendorong daerah untuk meningkatkan PAD demi kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Namun, rendahnya PAD Kota Ambon menunjukkan bahwa penerapan otonomi daerah sesuai UU ini belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan PAD, sehingga Kota Ambon dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian secara objektif dengan menganalisis data keuangan yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dihitung dan dianalisis untuk memecahkan masalah yang ada, sesuai dengan tujuan penelitian Rumus yang digunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

2.1 Rasio Kemandirian

Ukuran untuk mengetahui sejauh mana sebuah daerah bisa mengandalkan pendapatan yang dihasilkan sendiri, tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (100%) | Pola Hubungan |
|--------------------|--------------------|---------------|
| Sangat Rendah | 0% - 25% | Instruktif |
| Rendah | 25% - 50% | Konsultatif |
| Sedang | 50% - 75% | Partisipatif |
| Tinggi | 75% - 100% | Delegatif |

Interpretasi:

- Jika rasio ini tinggi, berarti daerah tersebut memiliki kemandirian yang tinggi dalam membiayai pengelolaannya.
- Jika rasio ini rendah, berarti daerah tersebut sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah lain, yang menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi.

2.2 Rasio Efektivitas

Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, seperti pemerintah daerah, berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

| Presentase Efisiensi % | Kriteria |
|------------------------|----------------|
| 100% keatas | Tidak efektif |
| 90% - 100% | Kurang efektif |
| 80% - 90% | Cukup efektif |
| 60% - 80% | Efektif |
| Kurang dari 60% | Sangat efisien |

Sumber: Keppmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

- 100% berarti anggaran digunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- Rasio lebih tinggi dari 100% menunjukkan bahwa daerah berhasil melampaui target yang diinginkan.
- Rasio di bawah 100% menunjukkan bahwa daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut.

2.3 Rasio Efisiensi

Ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu daerah dalam mengelola anggaran yang ada untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

| Presentase Efisiensi % | Kriteria |
|------------------------|----------------|
| 100% keatas | Tidak efisien |
| 90% - 100% | Kurang efisien |
| 80% - 90% | Cukup efisien |
| 60% - 80% | Efisien |
| Kurang dari 60% | Sangat efisien |

Sumber: Keppmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah dapat mengelola dan membiayai kegiatan pemerintahannya menggunakan sumber daya keuangan yang dimiliki sendiri, dibandingkan dengan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

$$\text{RDFF} = \frac{\text{Pendapatan asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

| Presentase % | Kriteria |
|--------------|---------------|
| 0 – 10% | Sangat Kurang |
| 10 – 20% | Kurang |
| 20 – 30% | Cukup |
| 30 – 40% | Sedang |
| 40 – 50% | Baik |
| >50% | Sangat Baik |

Sumber: Ana Muskita, (2017)

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan **Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** dari Pemerintah Kota Ambon yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Ambon, yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan keuangan di masa mendatang.

Rasio Kemandirian

| Tahun | PAD (Rp) | Pendapatan Transfer (Rp) | Rasio Kemandirian | Pola Hubungan |
|-----------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 2019 | 162.761.891.568,30 | 985.087.890.725,00 | 16,52% | Instruktif |
| 2020 | 131.753.250.767,07 | 973.189.179.158,00 | 13,53% | Instruktif |
| 2021 | 153.520.817.934,78 | 940.614.682.967,00 | 16,32% | Instruktif |
| 2022 | 177.889.732.162,73 | 917.963.704.149,00 | 19,37% | Instruktif |
| 2023 | 274.081.392.232,88 | 930.454.712.510,00 | 29,45% | Konsultatif |
| Rata-rata | | | 18,95% | Instruktif |

Pada tahun 2019, rasio kemandirian adalah 16,52%, yang artinya PAD hanya mencakup sekitar 16% dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa Kota Ambon masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2020, rasio turun menjadi 13,53%, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar terhadap dana transfer. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang lebih sulit akibat pandemi.

Namun, pada tahun 2021, rasio meningkat sedikit menjadi 16,32%, dan pada tahun 2022, rasio kembali naik menjadi 19,37%, menunjukkan ada sedikit perbaikan dalam kemandirian daerah.

Pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang signifikan dengan rasio mencapai 29,45%, menandakan adanya upaya yang lebih baik dalam meningkatkan PAD, meskipun ketergantungan pada dana pusat masih ada.

Namun nilai rata-rata rasio kemandirian yang rendah sekali yaitu 18,95% menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dengan Pola hubungan yang **Instruktif** berarti daerah masih mengikuti arahan dari pusat dalam mengelola keuangan. Agar lebih mandiri, daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat di masa depan. Daerah perlu mendorong diversifikasi sumber PAD dengan mengembangkan sektor unggulan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan studi Muhammad Rouffie dkk (2022) mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kota Bandung pada periode 2016-2021 mencapai 74,17% secara keseluruhan mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19.

Rasio Epektifitas

| Tahun | Realisasi Penerimaan PAD | Target Penerimaan PAD | Rasio Epektifitas (%) | Kriteria |
|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2019 | 162.761.891.568,30 | 184.452.217.679,00 | 88,24% | Cukup efektif |
| 2020 | 131.753.250.767,07 | 194.842.563.427,06 | 67,62% | Kurang efektif |
| 2021 | 153.520.817.934,78 | 234.429.747.272,00 | 65,48% | Kurang efektif |
| 2022 | 177.889.732.162,73 | 206.866.883.287,58 | 85,99% | Cukup efektif |
| 2023 | 274.081.392.232,88 | 392.368.579.761,00 | 90,64% | Efektif |
| Rata-rata | | | 74,19% | Kurang efektif |

Tahun 2019: Rasio efektivitas sebesar 88,24%, menunjukkan bahwa realisasi PAD cukup mendekati target yang ditetapkan. Kinerja ini dikategorikan sebagai cukup efektif.

Tahun 2020: Rasio turun menjadi 67,62%, menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, dengan kategori kurang efektif. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tantangan eksternal seperti dampak pandemi.

Tahun 2021: Rasio sedikit turun lagi menjadi 65,48%, yang masih masuk dalam kategori kurang efektif, mengindikasikan bahwa target PAD masih belum terpenuhi secara maksimal.

Tahun 2022: Rasio meningkat menjadi 85,99%, menunjukkan perbaikan dalam pencapaian target PAD, meskipun belum sepenuhnya efektif. Kinerja ini kembali masuk dalam kategori cukup efektif.

Tahun 2023: Rasio efektivitas mencapai 90,64%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam merealisasikan PAD. Capaian ini dikategorikan sebagai efektif, mencerminkan upaya Pemerintah Kota Ambon yang lebih optimal.

Rata-rata rasio efektivitas selama lima tahun terakhir sebesar 74,19% menunjukkan bahwa daerah belum berhasil mencapai target penerimaan PAD secara optimal dan masih tergolong kurang efektif. Meskipun ada perbaikan pada tahun 2022 dan 2023, capaian ini belum konsisten karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi dan tantangan internal dalam optimalisasi pendapatan. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan dan pemungutan PAD dengan menggali potensi baru, memperluas basis pajak dan retribusi, serta meningkatkan efisiensi dalam pemungutannya.

Rasio Efisiensi

| Tahun | Realisasi Belanja | Pendapatan Daerah | Rasio Efisiensi | Kriteria |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 2019 | 1.131.350.277.738,27 | 1.199.821.331.888,30 | 94,29% | Kurang efisien |
| 2020 | 1.061.974.497.282,29 | 1.146.467.282.588,07 | 92,63% | Kurang efisien |
| 2021 | 1.139.622.245.666,16 | 1.142.996.021.638,78 | 99,70% | Kurang efisien |
| 2022 | 1.110.263.638.646,00 | 1.114.446.345.044,73 | 99,62% | Kurang efisien |
| 2023 | 1.099.704.149.358,81 | 1.204.536.104.742,88 | 91,29% | Kurang efisien |
| Rata-rata | | | 95,43% | Kurang efisien |

Rasio efisiensi Kota Ambon dalam lima tahun terakhir memiliki nilai sebesar 95,43%, yang tergolong "kurang efisien". Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan pengelolaan belanja dalam hubungannya dengan pendapatan yang diterima. Pada beberapa tahun, rasio efisiensi mendekati 100% (seperti pada tahun 2021 dan 2022), namun belum mencapai kategori yang efisien. Upaya peningkatan efisiensi diperlukan untuk memastikan belanja daerah lebih optimal dan proporsional terhadap pendapatan. Langkah perbaikan dapat mencakup pengendalian belanja operasional, optimalisasi pendapatan daerah, serta evaluasi program kerja pemerintah daerah.

Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah habis untuk belanja rutin, sehingga sisa anggaran untuk pembangunan dan program lain sangat terbatas, sehingga pemerintah daerah perlu mengelola belanja dengan lebih ketat agar anggaran digunakan lebih optimal dan mendukung program prioritas

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Luceria Putri Natalia Pardede (2024) yang menyatakan Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2018–2022 tergolong cukup efisien dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio DDF | Kriteria |
|-------|------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| 2019 | 162.761.891.568,30 | 1.199.821.331.888,30 | 13,56% | Kurang |
| 2020 | 131.753.250.767,07 | 1.146.467.282.588,07 | 11,49% | Kurang |
| 2021 | 153.520.817.934,78 | 1.142.996.021.638,78 | 13,43% | Kurang |
| 2022 | 177.889.732.162,73 | 1.114.446.345.044,73 | 15,96% | Kurang |
| 2023 | 274.081.392.232,88 | 1.204.536.104.742,88 | 22,75% | Cukup |

Pada tahun 2019, rasio DDF sebesar 13,56%. Rendahnya sumbangan PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah mencerminkan

tingginya ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio tahun 2020 Rasio DDF: 11,49% turun dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa upaya meningkatkan PAD belum optimal. Ada sedikit peningkatan, tetapi kontribusi PAD masih kecil dibandingkan dengan total pendapatan.

Tahun 2021 Rasio DDF: 13,43% Kriteria: Kurang Ada sedikit peningkatan, tetapi kontribusi PAD masih kecil dibandingkan dengan total pendapatan.

Tahun 2022 Rasio DDF: 15,96% Kriteria Kurang Rasio meningkat, tetapi belum cukup signifikan untuk mengubah status kemandirian fiskal.

Tahun 2023 Rasio DDF: 22,75% Kriteria Cukup Terjadi peningkatan yang cukup besar, menunjukkan adanya perkembangan positif dalam meningkatkan PAD.

Rata-rata Rasio DDF (2019–2023) Rata-rata: 15,44% Kriteria Kurang Secara keseluruhan, tingkat kemandirian fiskal Kota Ambon masih rendah, meskipun ada kemajuan pada tahun terakhir.

Pada 2023, rasio DDF naik ke kategori "Cukup," namun masih belum mencapai tingkat "Baik." Rendahnya rasio ini disebabkan oleh PAD yang relatif kecil dibandingkan total pendapatan daerah, serta ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, kesadaran masyarakat Kota Ambon untuk membayar pajak dan retribusi masih rendah, sehingga PAD belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah.

Penelitian ini mendukung temuan Ledy Jeane Liline dan Khaeril (2024) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Provinsi Maluku pada 2018–2021 berada pada kategori "kurang" berdasarkan kapasitas keuangan daerah. Pada 2022, tingkat desentralisasi meningkat ke kategori "cukup". Kemandirian fiskal Provinsi Maluku pada 2018–2020 masih dalam tahap "belum mandiri" dan mulai memasuki tahap "menuju kemandirian" pada 2021.

4. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan rasio kemandirian pada tahun 2023, Pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan Tingkat rata-rata rasio kemandirian sebesar 18,95% selama periode 2019–2023, kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Ambon untuk terus menggali potensi PAD agar ketergantungan pada dana transfer bisa semakin berkurang, sehingga kemandirian fiskal daerah dapat meningkat.

2. Secara umum, kinerja efektivitas PAD Kota Ambon menunjukkan tren fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023. Namun, rata-rata selama lima tahun menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan agar Pemerintah Kota Ambon dapat memenuhi target PAD secara konsisten.
3. Pemerintah Kota Ambon perlu berfokus pada pengendalian belanja operasional, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mengevaluasi efektivitas program kerja secara berkala.
4. Kota Ambon masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, terutama hingga tahun 2022 dan Tahun 2023 menunjukkan perbaikan signifikan dengan rasio mencapai kategori Cukup, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kriteria Mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung, Anindita Primastuti, Riswati Riswati 2022 *Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat* Jurnal Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik Vol 9 No 2
- Luceria Putri Natalia Pardede 2024 *Analisis Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.2, No.2 e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 467-473
- Ledy Jeane Liline dan Khaeril 2024 *Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah (TKD) terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku* Volume 3, No. 3 E – ISSN 2807-7911